

PENGARUH INDEX DEVELOPMENT GENDER, GINI RATIO, DAN KEPEMILIKAN TELEPON GENGAM TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Komang Aria Darmaya¹

Anak Agung Ketut Ayuningsasi²

^{1,2}**Fakultas EkonomidanBisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia**

ABSTRAK

Fenomena ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh provinsi. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dengan kesenjangan gender serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi seperti telepon genggam. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Index Development Gender (IDG), Gini Ratio, dan kepemilikan telepon genggam terhadap IPM di 34 provinsi Indonesia selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terbaik yang dipilih melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial, IDG dan kepemilikan telepon genggam memiliki pengaruh positif dan signifikan, sementara Gini Ratio menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 71,5% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut menjelaskan sebagian besar variasi dalam IPM.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, gini ratio, ketimpangan pembangunan

Klasifikasi JEL: O10, J16, D63, O15

ABSTRACT

The phenomenon of human development inequality in Indonesia remains a significant issue in the effort to achieve equitable welfare across all provinces. This disparity is not only linked to unequal access to education and health services but also to gender inequality and limited access to technology, such as mobile phones. In this context, this study aims to analyze the influence of the Gender Development Index (GDI), Gini Ratio, and mobile phone ownership on the HDI across 34 Indonesian provinces during the 2019–2023 period. The method used is panel data regression, with the best model selected through the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test. The results indicate that, simultaneously, the three independent variables significantly affect the HDI. Partially, both the GDI and mobile phone ownership show a positive and significant effect, while the Gini Ratio has a significant negative effect on HDI. The coefficient of determination (R^2) value of 71.5% indicates that these three variables explain most of the variation in HDI.

Keywords: human development index, gender development index, gini ratio, mobile phones, development inequality

JEL Classification: O10, J16, D63, O15

PENDAHULUAN

Setiap manusia mengharapkan kehidupan yang sejahtera, sejahtera adalah keadaan atau kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial menerangkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa dalam mengamati suatu kesejahteraan, maka hal yang harus difokuskan adalah kondisi dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu (Budiman, 2019:82).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijelaskan oleh Badan Pusat Statistika sebagai ukuran untuk mengukur pencapaian dari pembangunan di suatu wilayah, walaupun IPM tidak mampu mengukur setiap dimensi pembangunan manusia tetapi IPM dianggap mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS 2013: 09). IPM dalam katalog BPS dijelaskan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik (Ali *et al.*, 2021:1193).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), ada tiga dimensi dasar IPM yakni kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM yang meningkat menandakan bahwa pembangunan di suatu wilayah atau negara berhasil dirasakan dan dijangkau manfaatnya oleh masyarakat, sehingga IPM tinggi menjadi capaian keberhasilan tata kelola pemerintahan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2019- 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Sensus Penduduk 2020, menunjukkan adanya variasi yang signifikan antarprovinsi. Beberapa provinsi memiliki nilai IPM yang tinggi beberapa provinsi lainnya memiliki nilai IPM yang mendekati rendah seperti terlihat pada Tabel 1 dan 2

Tabel 1. Provinsi dengan Nilai IPM tertinggi di Indonesia

Nilai IPM (Dalam Persen)							
No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI Jakarta	80,76	81,92	82,25	82,77	83,55	84,15
2	DI Yogyakarta	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09	81,62
3	Kepulauan Riau	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	77,97
4	Kalimantan Timur	76,61	75,94	76,60	77,36	78,20	78,79
5	Bali	75,38	76,52	76,69	77,40	78,01	76,54
6	Riau	73,00	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67
7	Banten	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77	76,35
8	Sumatera Barat	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
9	Sumatera Utara	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76
10	Sulawesi Utara	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04	75,68
11	Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35

Sumber data : BPS Indonesia, 2024

Tabel 1 menampilkan provinsi-provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia pada periode 2019–2024, yang menunjukkan bahwa provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Nilai IPM yang konsisten tinggi di provinsi-provinsi tersebut mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dalam menyediakan layanan publik.

Tabel 2. Provinsi dengan Nilai IPM yang cukup rendah di Indonesia

Nilai IPM (Dalam Persen)							
No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Papua	60,84	61,22	61,40	62,16	63,01	63,83
2	Papua Barat	64,70	65,94	66,11	66,72	67,47	67,69
3	NTT	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40	69,14
4	Sulawesi Barat	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80	70,46
5	Kalimantan Barat	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19
6	Gorontalo	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01
7	Sulawesi Tengah	69,50	70,31	70,54	71,01	71,66	72,24
8	Maluku Utara	68,70	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84
9	NTB	68,14	70,46	70,86	71,65	72,37	73,10
10	Lampung	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13
11	Maluku	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75	73,40

Sumber Data: BPS Indonesia, 2024

Tabel 2, terlihat adanya kesenjangan pembangunan, di mana beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Papua Barat mencatatkan nilai IPM yang masih

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum merata dan menyoroti perlunya kebijakan yang lebih inklusif serta pemerataan akses terhadap layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan provinsi-provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia pada periode 2019–2024, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur, yang tetap mencatatkan peningkatan IPM meskipun mengalami perlambatan pada masa pandemi. Namun, jika dibandingkan dengan Tabel 1.2, terlihat adanya kesenjangan pembangunan dengan provinsi-provinsi seperti Papua dan Papua Barat yang memiliki nilai IPM lebih rendah dan peningkatannya lebih lambat. Hal ini dapat dikaitkan dengan dinamika sosial selama periode 2019–2024 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Menurut data BPS tahun 2024 pada tabel 1.1 dan 1.2 Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal 2020 secara signifikan mengganggu sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sudah memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Dampaknya terlihat jelas pada stagnasi bahkan penurunan laju peningkatan IPM di berbagai wilayah, memperparah ketimpangan pembangunan antar provinsi dan mempertegas perlunya kebijakan afirmatif untuk percepatan pemulihan di daerah tertinggal.

Salah satu aspek penting yang ikut terdampak dan turut berkontribusi terhadap perlambatan pembangunan manusia selama pandemi adalah kesenjangan gender dalam sektor tenaga kerja, hal ini bisa terjadi karena pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada krisis kesehatan tetapi menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak kepada pasar tenaga kerja (Profeta,2021:270). Kesenjangan Gender yang sudah ada diperburuk oleh pandemi sehingga menimbulkan fenomena "She-cession", fenomena ini berbeda dengan krisis keuangan 2008, karena pada masa pandemi ini tenaga kerja perempuan dipekerjakan secara tidak proporsional akibat terdampak signifikan oleh kebijakan-kebijakan karantina wilayah dan pembatasan jaga jarak sosial. Selain itu kondisi kehidupan dan keseimbangan kehidupan kerja telah terpengaruh secara serius karena pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak meningkat selama pandemi (Profeta,2021:270). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, TPAK Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki tercatat sebesar 84,40 persen, sementara perempuan hanya 57,81 persen. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki meningkat menjadi 85,65 persen, dan perempuan menjadi 64,63 persen. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja, yang dapat

mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sangat penting guna mencapai kesetaraan gender dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia di Indonesia. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender dalam pembangunan manusia (Giyono & Maemunah, 2021). Kesenjangan gender yang signifikan dapat memperlambat perkembangan suatu negara karena perempuan, yang merupakan separuh dari total penduduk, seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan (World Bank, 2012).

Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang turut memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pendapatan (*income*). Pendapatan berperan penting dalam membangun kualitas hidup manusia, baik pada tingkat individu, kelompok, wilayah, maupun negara. Menurut Meydiasari & Soejoto (2017) pendapatan sering kali digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, karena bekerja untuk memperoleh pendapatan adalah salah satu cara mencapai kesejahteraan.

Salah satu penyebab perbedaan IPM antar provinsi di Indonesia adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan masalah umum di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pernyataan ini didukung Teori ketimpangan yang menjelaskan bahwa disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat (Kuncoro, 2006). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sadono, 2010).

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, kepemilikan telepon genggam menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemajuan teknologi dan akses informasi di suatu negara. Di Indonesia, kepemilikan telepon genggam telah meningkat pesat dan menjadi alat penting bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki telepon

genggam, meningkat dari 65,87% pada tahun 2021 . Selain itu, pada tahun 2023, persentase kepemilikan telepon seluler di DKI Jakarta mencapai 82,47%, tertinggi di Indonesia

Kepemilikan telepon genggam, khususnya smartphone, berpengaruh signifikan terhadap penggunaannya. Hal itu bisa terjadi karena adanya dampak signifikan dari akses teknologi informasi kepada Indeks Pembangunan Manusia, akses terhadap teknologi informasi memainkan peran penting terhadap dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena memberikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang bisnis ataupun lowongan kerja (Jatmiko, Andriyan Rizki, et all, 2023: 84) Smartphone dengan berbagai fitur dan kemampuan komputasi yang lebih canggih memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi . Namun, meskipun akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses dan pemanfaatannya, baik dari segi wilayah maupun gender. Fenomena ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam hal geografis, budaya, dan sosial yang tinggi (Jatmiko, Andriyan Rizki, et all, 2023: 84). Sebagai contoh, berdasarkan data yang termuat di Databoks pada tahun 2022, persentase penduduk perempuan yang memiliki telepon genggam hanya mencapai 62,91%, sedangkan pada laki-laki mencapai 72,76%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dalam bentuk rangkaian waktu (*time series*) dari tahun 2019 hingga 2024, kemudian dianalisis menggunakan metode Regresi Data Panel. Data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai data sekunder. Penelitian ini berfokus pada *Index Development Gender*, *Gini Ratio*, Kepemilikan Telepon Genggam, dan Indeks Pembangunan Manusia industri pariwisata di Indonesia, yang terdiri dari 38 Provinsi tetapi hanya menggunakan data dari 34 Provinsi dikarenakan data dari 4 Provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi di Pulau Papua. Studi ini menyelidiki pengaruh *Index Development Gender*, *Gini Ratio*, dan Kepemilikan Telepon Genggam terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Data sekunder yang diolah dengan skala tahunan digunakan dalam penelitian ini. Data yang

dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan secara observasi non-perilaku, menggunakan publikasi, dokumen, dan situs web Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.

Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, yang sering disebut dengan *pooled time series*, dimana data *cross section* mengobservasi nilai dari satu atau lebih variabel yang diambil dari beberapa unit sampel atau subjek pada periode waktu yang sama, dan data *time series* mengobservasi nilai dari satu atau lebih variabel selama satu periode waktu (Sugiyono, 2018). Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel Indeks Pembangunan Manusia I pada waktu t

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien regresi variabel X1 (Index Development Gender)

β_2 = Koefisien regresi variabel X2 (Gini Ratio)

β_3 = Koefisien regresi variabel X3 (Kepemilikan Telepon Genggam)

X_{1it} = Index Development Gender I pada waktu t

X_{2it} = Gini Ratio I pada waktu t

X_{3it} = Kepemilikan telepon genggam i pada waktu t

ε_{it} = Error Term I pada waktu t

Beberapa variabel independen, termasuk jumlah *Index Development Gender* (IDG), jumlah *Gini Ratio*, dan jumlah Kepemilikan Telepon Genggam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model regresi menunjukkan hubungan antara variabel-variabel ini; β_0 sebagai konstanta (*intercept*) dan β_1 hingga β_3 sebagai koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen. Model ini juga memperhitungkan faktor kesalahan (ε) dan mengamati periode waktu t di 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Tabel 3, Nilai probabilitas bahwa masing-masing variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% atau lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak ada dalam model penelitian. Untuk memeriksa heteroskedastisitas pada model

penelitian data panel, variabel dependen diubah menjadi RESID. Karena model data panel lebih cenderung bersifat *cross-section* daripada *time series*, hal ini dilakukan.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Statistik Uji	Nilai
F-statistic	2,915,810
Prob. F	0,1354
Obs*R-squared	8,548,493
Prob. Chi-Square	0,1359
Scaled explained SS	1,168,152
Prob. Chi-Square	0,1086

Sumber data : Output Eviews12

Menurut Tabel 3, hasil uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi matriks atau korelasi matriks dengan nilai yang lebih rendah dari 0,8. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan ini tidak mengandung multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	0.78178632352675	0.7325098285573181
		1	
X2	0,78178632352675	1	0.4423829362788433
	1		
X3	0.73250982855731	0.44238293627884	1
	81	33	

Sumber : Output Eviews12

Nilai probabilitas cross-section F adalah 0.0000 berdasarkan hasil uji Cho, yang disajikan dalam Tabel 4, yang berarti H_0 dapat ditolak karena nilainya lebih kecil dari Alpha 0,05. Ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* adalah model terbaik untuk digunakan dalam regresi data panel ini.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Jenis Uji	Statistik Uji	Derajat Kebebasan (df)	Nilai Probabilitas (p-value)
Cross- section F	26.464.872	(5, 27)	0.0000
Cross- section Chi-square	63.903.789	5	0.0000

Sumber data : Output Eviews 12

Berdasarkan hasil uji Hausman yang ditunjukkan pada Tabel 5, H_0 diterima karena nilai probabilitasnya lebih rendah dari 0,05, yaitu 0,0345. Ini menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil uji Hausman, Pilihan terbaik adalah model *Fixed Effect*.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Jenis Uji	Statistik Chi-Square	Derajat Kebebasan	Nilai Probabilitas (p-value)
<i>Cross- section random</i>	77.241.220	3	0.0000

Sumber data : Output Eviews 12

Pengujian spesifikasi dengan metode Chow dan Hausman merekomendasikan penggunaan model Fixed Effect. Selain itu, hasil pengujian pemilihan model terbaik yang ditampilkan pada Tabel 6 juga mengindikasikan bahwa model Fixed Effect paling sesuai untuk mengestimasi data panel. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas pada variabel independen dalam model Fixed Effect yang lebih tinggi dibandingkan dengan model Random Effect.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36,66694	9,859158	3,719075	0,0009
X1	0,014452	0,138754	0,104157	0,9178
X2	95,20927	27,75777	3,430004	0,0020
X3	0,036010	0,052709	0,683186	0,5003
Test Hypothesis				
	Cross-section	Time	Both	
Breusch-Pagan	14.42492	0.952611	15.37754	
	(0.0001)	(0.3291)	(0.0001)	
Statistik Uji			Nilai	
F-statistic			2,915,810	
Obs*R-squared			8,548,493	
Prob. Chi-Square			0,1359	

Sumber data : Output Eviews 12

Catatan: () standar error. ***, **, * adalah level signifikansi 1%, 5%, dan 10%.

Pengujian T dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai probabilitasnya di bawah 0,05,

maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen dalam model. Namun, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Estimasi *Fixed Effect Model*

<i>R-squared</i>	0.974985	<i>Mean dependent var</i>	76,84667
<i>Adjusted R-squared</i>	0.913395	<i>S.D. dependent var</i>	3,629423
<i>S.E. of regression</i>	0,1359	<i>Sum squared resid</i>	461,0448
<i>F-statistic</i>	2,915,810	<i>Durbin-Waston stat</i>	1.963144
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber data : Output Eviews 12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Index Development Gender* terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian t menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan signifikansi 0,9178 ($> 0,05$) dan t-statistik hanya 0,1042. Artinya, variasi Indeks Pembangunan Gender tidak cukup kuat untuk memengaruhi perubahan IPM. Kondisi ini terjadi kemungkinan karena indikator gender seperti perbedaan pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan antara laki-laki dan perempuan belum cukup tajam atau variatif di tingkat provinsi selama periode penelitian untuk berdampak pada IPM secara keseluruhan.

Temuan serupa terdapat pada studi oleh Sitti Aminah et al. (2023), yang menemukan bahwa faktor pendidikan dan kesehatan adalah penentu utama Indeks Pembangunan Gender, sedangkan variabel-variabel lain belum memberikan pengaruh yang signifikan. Demikian pula, Putri & Rozaini (2023) dalam studi mereka di Sumatra mencatat bahwa perbedaan konsumsi per kapita atau partisipasi politik tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan Indeks Pembangunan Gender. Artinya, kesenjangan gender memang ada, tetapi belum menjadi faktor utama yang mendorong perubahan IPM di Indonesia pada saat ini.

Pengaruh Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Gini Ratio menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (signifikansi = $0,0020 < 0,05$; t-statistik = 3,4300). Ini berarti semakin tinggi kesenjangan pendapatan, IPM cenderung meningkat. Hasil positif dan signifikan ini bisa mengindikasikan bahwa pada tingkat kesenjangan yang relatif moderat di Indonesia (periode penelitian), disparitas pendapatan mampu memacu akumulasi aspek-aspek IPM seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Namun perlu diwaspadai bahwa pencapaian IPM yang tinggi mungkin hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, ketimpangan ekstrem justru dapat berbalik menurunkan kualitas hidup kelompok rentan

Secara teori, kesenjangan dapat memicu investasi di sektor-sektor produktif dan perbaikan layanan publik, sehingga mencerminkan pertumbuhan kualitas hidup sebagian populasi yang cukup besar. Misalnya, penelitian Amaluis et al. (2024) di Sumatera Barat menemukan pengaruh negatif kesenjangan pada IPM saat kesenjangan terlalu ekstrim, namun sekaligus menemukan bahwa tingkat kesenjangan tertentu bisa menjadi pendorong awal pertumbuhan sosial-ekonomi.

Pengaruh Kepemilikan Telepon Genggam terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Kepemilikan Telepon Genggam (X3) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (signifikansi = $0,5003 > 0,05$; t- statistik = 0,6832). Meskipun secara teoritis digitalisasi dan akses informasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan publik, ternyata peningkatan kepemilikan ponsel belum berbanding lurus dengan peningkatan IPM. Hal tersebut bisa terjadi karena keberadaan ponsel lebih bersifat alat komunikasi dasar dibanding sarana pendidikan atau ekonomi produktif. Perlu intervensi seperti e-learning atau layanan kesehatan digital agar manfaat kepemilikan ponsel dapat diterjemahkan ke peningkatan IPM.

Penelitian di Pulau Jawa oleh Dewi et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan komputer dan internet lebih berpengaruh terhadap durasi sekolah dan akses pendidikan dibandingkan ponsel. Selain itu, literasi digital menjadi kunci mobile ownership tidak berarti digital utility jika tidak disertai kemampuan penggunaan untuk hal produktif. Sebuah penelitian di Bali menyatakan bahwa meski mobile banking meningkat, dampaknya pada pemberdayaan ekonomi masih terbatas tanpa peningkatan literasi digital. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang memperkuat penggunaan ponsel melalui literasi, konten edukatif,

dan integrasi layanan publik, supaya kepemilikan ponsel dapat benar-benar berkontribusi pada aspek pendidikan dan kesehatan dalam IPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan model fixed effect, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

Indeks Pembangunan Gender (X1) ternyata tidak berpengaruh terhadap IPM. Dampak kesetaraan gender, sebagaimana diukur melalui komponen dasar GDI/IPG, masih belum cukup kuat untuk mempengaruhi perbaikan dalam indikator pembangunan manusia di Indonesia. Gini Ratio (X2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesenjangan pendapatan dalam tingkat tertentu dapat mendorong investasi dan perbaikan layanan publik yang berdampak pada kenaikan IPM. Kepemilikan Telepon Genggam (X3) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Akses teknologi perlu disertai dengan literasi digital dan fasilitas pendukung agar memiliki efek nyata terhadap aspek pendidikan dan kesehatan dalam IPM.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, kami menyarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut. Gini Ratio berada pada kisaran moderat yang dapat mendukung konsumsi merata dan perbaikan akses layanan publik tanpa menciptakan ketimpangan ekstrem. Selain itu, penguatan literasi digital dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi mobile, seperti *e-health* dan *e-learning*, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang berdampak positif pada IPM. Program pemberdayaan perempuan juga harus diprioritaskan untuk meningkatkan kontribusi Indeks Pembangunan Gender dalam pembangunan manusia.

Penelitian selanjutnya dapat memperkenalkan variabel mediasi, seperti literasi digital atau kualitas layanan publik, untuk mengeksplorasi pengaruh tidak langsung terhadap IPM. Pendekatan analisis spasial dan temporal juga disarankan untuk memahami dinamika pengaruh antar provinsi dan sepanjang waktu. Selain itu, penelitian kualitatif seperti wawancara atau studi kasus dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang tidak signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan kepemilikan telepon terhadap IPM.

REFERENSI

- Ali, A. *et al.* (2021) 'The Impact of Gender Inequality and Environmental Degradation on Human Well-Being in The Case of Pakistan: A Time Series Analysis.', *MPRA Paper*, (106655), pp. 1–18.
- Anjaningrum, W. D. and Sidi, A. P. (2018) 'Determinan Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Industri Kreatif', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 14(1), pp. 40–56.
- Ariza, A. (2016) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), pp. 1–21. doi: 10.24260/almaslahah.v12i1.348.
- Aryani, Y., Andari, W. and Suhindarto, S. (2020) 'Pengaruh Teknologi Informasi Dan E-Commerce Terhadap Perdagangan Indonesia Ke Negara ASEAN"', *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(1), pp. 53–66.
- Basuki, A. T. and Prawoto, N. (2016) *Analisis Regresi dalam Penelitian. Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EvIEWS*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chotimah, K. (2017) 'Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia', *Universitas Lampung Repository*.
- Giyono, U. and Maemunah, M. (2021) 'Perempuan Dalam Indeks Pembangunan Manusia (Kajian Ipm-Ipg Dan Idg Sumber Kemenpp Tahun 2019)', *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), pp. 75–86. doi: 10.24929/fh.v8i2.1580.
- Israpil (2017) 'Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya).', *Jurnal Pusaka*, 5(2), pp. 141–150.
- Jatmiko, A. R. *et al.* (2023) 'Signifikansi Pengaruh Akses Teknologi Informasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia', *JiTEKH*, 11(2), pp. 83–94. doi: 10.35447/jitekh.v11i2.780.
- Kuncoro, M. (2006) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lanjouw, P. *et al.* (2001) *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?* 2739. Washington D.C.: World Bank Working Paper.
- Meydiasari, D. A. and Soejoto, A. (2017) 'Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan*, 01(02), pp. 116–126.
- Nugraheni, W. S. (2012) 'Peran dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan', *Journal of Educational Social Studies*, 1(2), pp. 104–111.
- A. I. and Dessy, H. S. (2017) 'Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia',

Share : Social Work Journal, 7(1), p. 71. doi: 10.24198/share.v7i1.13820.

Sari, I. P. and Miftah, Z. (2021) 'Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Klaster Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh di Provinsi Jawa Timur', *Sosio e-Kons*, 13(2), p. 87. doi: 10.30998/sosioekons.v13i2.9760.

Sholehuddin, P. M. (2023) 'Gender : Kesenjangan Gender dan Pemicu Permasalahan',
Lembaga Kajian Gender UMSURABAYA.

Simanjuntak, S. K. and Andriyani, D. (2021) 'Pengaruh AHH, IDG, dan JP Terhadap IPM di Indonesia', *Jurnal Ekonomika Indonesia Unimal*, 10(02), pp. 33–43.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, O. (2017) 'Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)',
Jurnal Sosial Politik, 2(1), p. 103. doi: 10.22219/sospol.v2i1.4759.

Todaro and Smith (2003) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Tri Basuki, A. and Saptutyingsih, E. (2016) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota DIY)', *Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*, 14(1), pp. 1–20.

Wisnujati, N. S. (2020) 'Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 20(2), pp. 67–81. doi: 10.30742/jisa20220201224.

Yuniar, S. H. (2022) 'Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), pp. 19–29. doi: 10.55049/jeb.v14i2.116.

et al. (2022) 'Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), pp. 221–242. doi: 10.21002/jepi.2022.13.

Wididarma, Komang. & Jember, Made. (2021) 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 10, No 7: 2982-3010.

Megantara, Dede Edwin. & Sri Budhi, Made Kembar. (2020) 'Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 9, No 1: 91-119.

Devanty, Cynthia Putri. & Saskara, Ida Ayu Nyoman. (2017) 'Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh

Kabupaten Gianyar', E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol 6, No 4: 472-498.

Pradnyadewi, Diah. & Purbhadharmaja, Ida Bagus Putu. (2017) 'Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia', E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol 6, No 2: 256-285

Krismiyaniti, Ni Made Eva. & Utama, Made Suyana. (2020) 'Pengaruh Sektor Pariwisata dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan'. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol 9, No 6: 1261-1289.

Profeta, Paola. (2021) 'Gender Equality and COVID-19 Pandemic: Labour Market, Family Relationships, and Public Policy'. Intereconomics. Vol 56, No 5: 270-273.

Jatmiko, Andriyan Rizki. et al. (2023) ' Signifikansi Pengaruh Akses Teknologi Informasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia'. Jurnal Ilmiah Teknologi Harapan. Vol 11, no 2: 83-94.